Bali Post

Lagi, Penambang Pasir Ilegal Ditangkap di Bhuana Giri

Amlapura (Bali Post) -

Polisi kembali menangkap penambang pasir ilegal di galian C Desa Bhuana Giri Kecamatan Bebandem, Karangasem. Pelaku Sony Sutiawan (55) tak berkutik setelah diringkus anggota Sat. Reskrim Polres Karangasem, Kamis (15/10) malam pukul 22.30 wita.

Kasat Reskrim Polres Karangasem AKP Noor Maghantara, dikonfirmasi, Jumat (16/10) kemarin, membenarkan upaya penangkapan tersebut. Namun, pihaknya enggan memberikan keterangan lebih lanjut. "Nanti silakan langsung minta keterangan lebih lanjut dengan bapak kapolres," ujarnya. Sumber di Mapolres Karangasem, Jumat kemarin, menyampaikan sejak awal Mapolres Karangasem telah melakukan penyelidikan terhadap maraknya galian C ilegal di Kecamatan Rendang, Selat, Bebandem, dan Kubu. Upaya Mapolres Karangasem, juga berdasarkan perintah dari Polda Bali.

Setelah melakukan penyelidikan di Banjar Dinas Nangka, masyarakat setempat menyampaikan informasi kepada petugas, bahwa di tempat ini marak terjadi aktivitas penambangan ilegal. Polisi semakin mengintensifkan penyelidikan di tempat ini. Polisi lantas menemukan pelaku Sony Sutiawan tertangkap basah melakukan pertambangan ilegal. Saat diciduk polisi, pelaku tak bisa menunjukkan dokumen yang sah. Sehingga, malam itu juga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Karangasem.

Selanjutnya, pihak kepolisian menghentikan seluruh aktivitas tambang milik pelaku. Demikian juga sejumlah titik lokasi tambang liar lainnya di banjar setempat. Sayangnya, dari maraknya aktivitas tambang liar di lokasi, polisi hanya bisa menangkap satu orang pelaku berikut mengamankan satu alat berat dan uang tunai hanya Rp 200 ribu. Selain itu, polisi juga mengamankan catatan penjualan pasir, sidi sekrin manual terbuat dari besi dan satu unit truk DK 9598 GP. Seluruh barang bukti diamankan di Mapolres Karangasem, untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Upaya penertiban galian C ilegal ini rencananya bakal terus dilakukan jajaran kepolisian. Pasalnya, jika kegiatan tambang liar ini terus dibiarkan, alam kaki Gunung Agung akan

Edisi : Sabtu, 17 Oktober 2015

Hal : 13

Bali Post

semakin rusak dan bencana alam mengancam. Kapolres Karangasem, AKBP I Gede Adhi Mulyawarman, ketika dikonfirmasi Jumat kemarin, mengakui penangkapan pelaku tambang pasir ilegal di Banjar Dinas Nangka. Namun, pihaknya mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih jauh, karena masih tugas dinas ke luar kota.

Sebagaimana diberitakan Sabtu (10/10), Polda Bali telah menggerebek lokasi galian C ilegal di Banjar Dinas Bukit Paon Desa Bhuana Giri. Dalam penggerebekan tersebut, Polda mengamankan dua penambang ilegal, antara lain berinisial Nyoman DS dan Gede SN. Kadiv Humas Polda Bali Kombes Pol. Herry Wiyanto, saat itu mengatakan DS tak bisa berkutik saat digerebek sedang melakukan aktivitas tambang di lokasi galian C ilegal bersama sejumlah buruhnya. Polisi langsung mengamankan satu alat berat eksavator, dua unit pengayak pasir dan satu unit *dump truck* milik tersangka. Sedangkan, SN langsung digelandang ke Polda Bali, karena saat digerebek, tak sanggup menunjukkan dokumen perizinan.

Polisi juga mengamankan dua eskavator, satu pengayak pasir dan uang tunai Rp 8 juta. Kedua tersangka sudah ditahan di Polda Bali. Saat ini, Polda Bali masih menyasar para penambang ilegal lainnya. Pasalnya, dari empat kecamatan lokasi tambang, yakni Kecamatan Rendang, Selat, Bebandem dan Kubu, dinyalir masih ada puluhan titik lokasi galian C ilegal. Pascapenggerebekan itu, sejumlah penambang ilegal sementara memilih berhenti beraktivitas, dari pada ikut diangkut Polda Bali. **(kmb31)**

Edisi : Sabtu, 17 oktober 2015

Hal : 13

Bali Post

Penundaan Pembahasan KUA-PPAS 2016

Sikap Dewan Dinilai Rugikan Masyarakat

Gianyar (Bali Post) –

Pembatalan rapat pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) tahun 2016 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gianyar, Kamis (15/10) lalu, dinilai sarat kepentingan politis. Komponen masyarakat menilai, alasan yang dipaparkan anggota dewan tidak substantif dan justru cenderung merugikan kepentingan masyarakat.

"Muatan politisnya terlalu besar. Saya kira ketidakpastian pencairan dana hibah dan bansos serta ketidakhadiran bupati dalam rapat tidak bisa dijadikan alasan," ujar pengamat sosial Ketut Wijaya, Jumat (16/10) kemarin.

Menurutnya, pembatalan rapat dengan alasan gamangnya pencairan bansos dan hibah di APBD Perubahan tahun 2015 justru tidak masuk akal. Pasalnya, dalam hal ini seolah-olah dewan sudah melakukan penilaian berlebihan.

"Seharusnya kan proses pembahasan tetap jalan. Yang penting perangkatnya disiapkan dulu. Andai kata nanti tidak bisa dicairkan, toh prosesnya sudah dijalankan oleh dewan. Yang penting dijembatani dulu kepentingan masyarakat dengan menyiapkan segala sesuatunya. Yang penting beliau-beliau itu sudah berusaha. Jangan nanti misalnya sudah ada kebijakan pemprov atau pemerintah pusat, justru kita yang tidak siap. Kan masyarakat juga yang rugi," kata tokoh masyarakat asal Abianbase, Gianyar ini.

Demikian pula alasan ketidakhadiran bupati dalam rapat. Menurut Wijaya, bupati sudah mendelegasikan kewenangannya yang dalam hal ini kepada Asisten III. Semestinya, rapat Banggar tetap dilanjutkan. Sebab apa pun hasilnya, Asisten III akan melaporkannya ke bupati. "Berbeda halnya kalau dari eksekutif tidak hadir. Baru itu bisa dibatalkan rapatnya. Saya khawatir kalau begini terus, pembahasan anggaran akan telat dan masyarakat juga yang dirugikan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua TAPD yang juga Sekda Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra mengungkapkan, soal tidak kuorumnya anggota dewan bukanlah ranah eksekutif dan sepenuhnya diserahkan ke dewan. Dia menegaskan, eksekutif telah memenuhi kewajiban menghadiri rapat yang dijadwalkan oleh dewan. Bahkan, dia menyatakan, sebenarnya dari seluruh TAPD, hanya Inspektorat yang pimpinannya berhalangan hadir. "Saya sendiri akan hadir. Tapi jelang rapat dimulai, Asisten III komunikasi ke saya bahwasanya rapat akan ditunda karena dewan tidak kuorum," ujarnya.

Soal ketidakhadiran bupati, pria yang akrab disapa Gus Gaga itu mengungkapkan, alasan itu sebenarnya kurang tepat. Menurutnya, secara normatif dan etika, rapat antara TAPD dengan Banggar sebenarnya tak perlu dihadiri bupati. "Dari dulu, berpuluh-puluh tahun memang bupati tidak hadir. Kalau sidang paripurna, baru bupati hadir," tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya pun menganggap penundaan rapat tersebut dapat memengaruhi pembahasan KUA-PPAS tahun 2016. "Tentu saja berpengaruh. Ini kan sudah dijadwalkan dewan. Kami selalu ikuti yang dijadwalkan. Penundaan itu berarti terlambatnya pembahasan APBD," kata Gus Gaga. **(kmb25)**

Edisi : Sabtu, 17 oktober 2015

Hal : 9